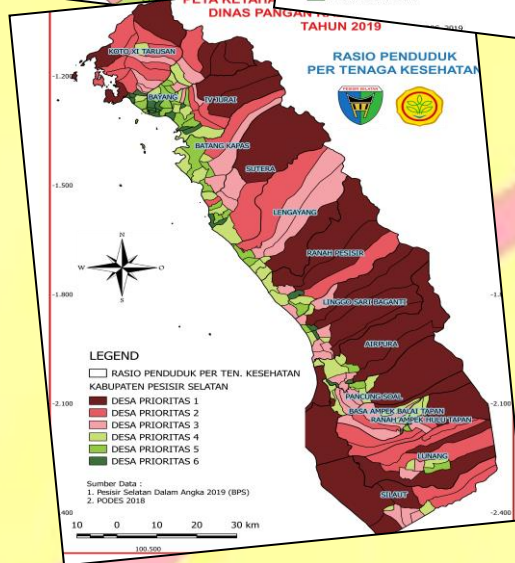
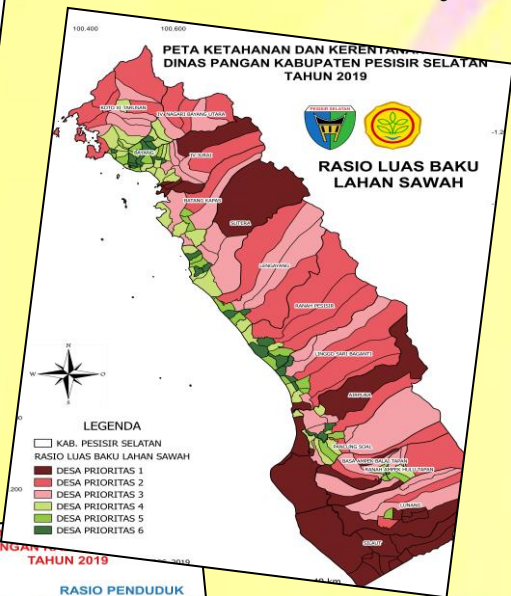
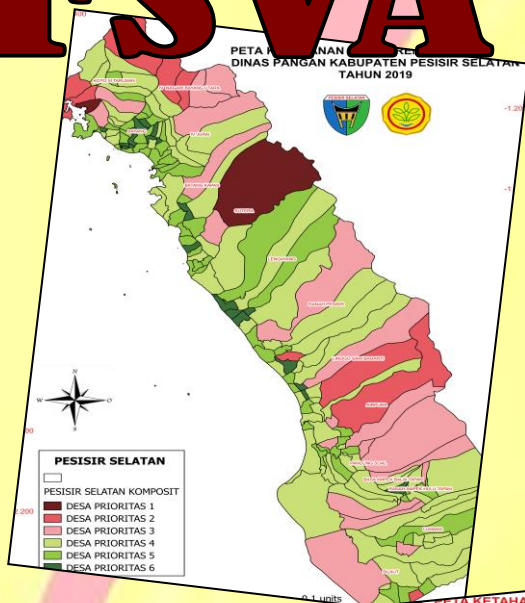


Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan **KAB. PESISIR SELATAN**

Food Security Vulnerability Atlas

FSVA Tahun 2019



DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Beta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA) dibuat dalam suatu tatanan kerjasama yang sangat baik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesisir Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui koordinasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Peta ini menyajikan informasi tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan sampai pada tingkat Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang digambarkan dalam 3 dimensi yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, dan Pemanfaatan Pangan. Peta ini juga menyajikan analisis mengenai kerentanan terhadap bencana alam untuk kesiapsiagaan bencana yang lebih baik, Rekomendasi dan strategi penanganan kerawanan pangan.

Besar harapan kami peta ini dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi oleh seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah dan swasta serta Upaya-upaya penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan dapat secara efektif menangani permasalahan dan prioritas penanganan sebagaimana dituangkan dalam peta ini.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Teknis, atas dukungan dan kerjasama yang intensif dalam upaya penyusunannya sehingga peta ini dapat diluncurkan. Pada akhirnya kami berharap peta ini dapat bermanfaat demi tercapainya kondisi

ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih baik, dan saran untuk penyempurnaannya sangat kami perlukan.



**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DINAS PANGAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI PESISIR SELATAN	i
KATA PENGANTAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	Iv
EKSEKUTIF SUMMARRI	v
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	4
1.3. Metodologi	8
2 KETERSEDIAAN PANGAN	
2.1. Lahan Pertanian	14
2.2. Produksi Pangan	15
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	24
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	25
3 AKSES TERHADAP PANGAN	
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	27
3.2. Akses Transportasi	28
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	30
4 PEMANFAATAN PANGAN	
4.1. Akses Terhadap Air Bersih	32
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	33
4.3. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan	34
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	37
5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	42
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	44
6 REKOMENDASI KEBIJAKAN	

EKSEKUTIF SUMMARY

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat **memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di Kabupaten Pesisir Selatan**. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten Pesisir Selatan merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah Nagari. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari 3 (tiga) aspek Ketahanan Pangan, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan. Pemilihan Indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam

mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah Nagari 6 (Enam) indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten Pesisir Selatan.

4. **Indikator pada Aspek Ketersediaan Pangan** adalah (1) Rasio Luas Lahan Baku Sawah terhadap Luas Lahan Total; (2) Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi terhadap Jumlah Rumah Tangga. **Indikator pada Akses Pangan** adalah (1) Rasio Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah terhadap Total Jumlah Penduduk; (2) Desa dengan Akses Penghubung Kurang Memadai. **Indikator pada aspek Pemanfaatan Pangan** adalah: (1) Rasio Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih; (2) Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk.
5. Nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2019 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 dari 182 Nagari/Desa di Kabupaten Pesisir Selatan, 2 Nagari/Desa masuk dalam prioritas 1 (1,09%) yaitu Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutura, dan Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, 9 Nagari/desa prioritas 2 (4,9%) dan 21 Nagari/desa prioritas 3

(11,5%). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan IV Jurai, IV Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Koto XI Tarusan, Silaut Lunang, Basa Ampek Balai Tapan, Pancung Soal, Airpura dan Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir dan Lengayang yaitu sebanyak 91 Nagari/desa.

7. Karakteristik desa rentan pangan dapat analisa dengan berbagai faktor penyebab diantaranya :

- (1) Jumlah Tenaga Kesehatan yang sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah kepadatan penduduk di Nagari tersebut, tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk dan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat di nagari akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman, jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.
- (2) Sumber air bersih yang masih kurang sehingga Rumah tangga tidak bisa mengakses air bersih ditingkat rumah tangganya, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya tidak memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat diminum/perlu proses yang panjang sehingga dapat di minum, sumber air bersih yang tidak terlindungi dan akan meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makan yang pada akhirnya akan memperngaruhi status gizi masyarakat.
- (3) Tingkat Kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga daya beli masyarakat tidak memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

(4) Luas Baku lahan sawah tidak sebanding dengan luas lahan Nagari dan jumlah penduduknya, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan sawah dengan baik, dan produksi padi mengalami penurunan, yang mengakibatkan konsumsi masyarakat sangat kurang.

8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan :

- 1) Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal, berupa program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- 2) Pembukaan lahan pertanian pertanian baru/ cetak sawah baru dilahan-lahan marginal.
- 3) Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan usaha tani, air bersih, embung), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- 4) Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan oleh tenaga kesehatan.
- 5) Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
- 6) Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat/ Lumbung Pangan Masyarakat sebagai salah satu usaha Tingkat Ketersediaan pangan yang memadai.
- 7) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ditingkat Nagari.
- 8) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Nagari bersama Gapoktan.

- 9) Desa Mandiri Pangan/ Nagari Mandiri Pangan dengan melibatkan perangkat Nagari dan OPD yang ada di Kabupaten dan Provinsi.
- 10) Penyediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di tingkat petani.
- 11) Penggunaan teknologi pertanian spesifik lokasi sesuai anjuran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 182 (seratus delapan puluh dua) nagari dengan total penduduk sebesar 460.716 jiwa sampai dengan tahun 2018. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 47 pulau. Secara geografis terletak di bagian Barat garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara $100^{\circ} 19'$ - $101^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara $0^{\circ} 59'$ - $2^{\circ} 28,6'$ Lintang Utara/Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia yang memiliki wilayah seluas 5,749,89 km². Secara klimatologis.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pola tipe curah hujan tipe sedang, yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Secara historis perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tergantung pada sektor Pertanian yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor ini tahun 2016 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun 2016 peranannya turun dari 41,65% menjadi 40,55%. Penurunan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Transportasi dan Pergudangan juga mengalami penurunan, akhirnya

penyediaan Akomodasi dan Makan minum mengalami kenaikan peranannya. Selain sektor Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Transportasi dan Pergudangan, penyediaan Akomodasi dan Makan minum, sektor yang mengalami kenaikan tahun 2016 adalah sektor Industri Pengolahan, yaitu dari 8,06% menjadi 8,14%; sektor Konstruksi dari 9,42% menjadi 9,51%; dan sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor dari 11,23% menjadi 11,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya

perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-

undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

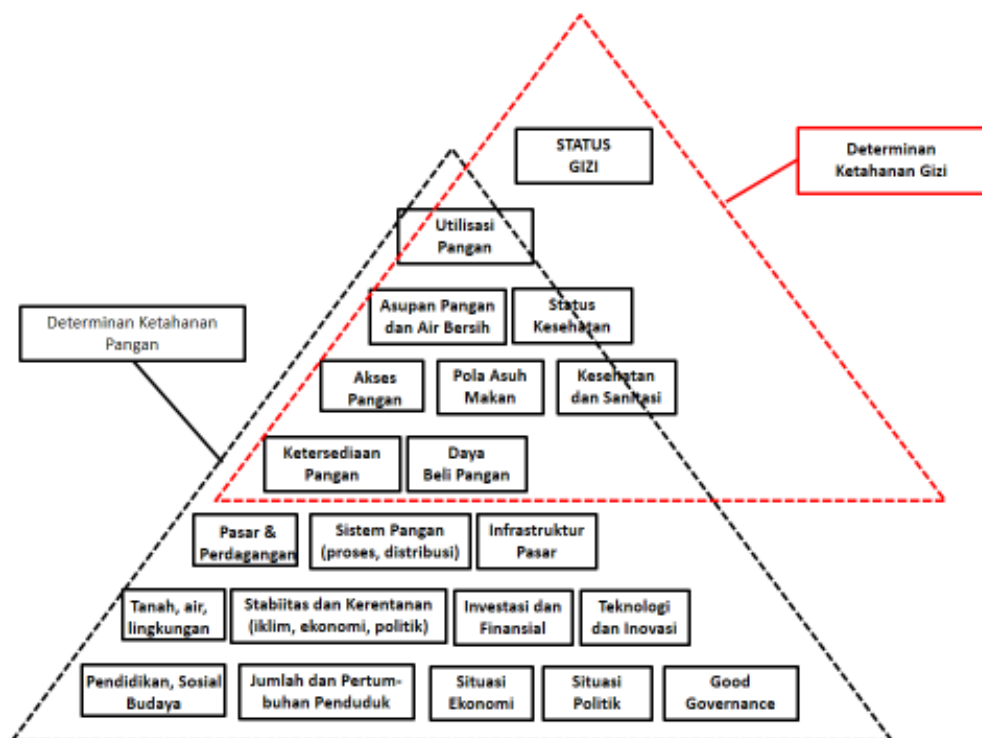
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta

mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan

ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah

dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah

dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2019

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2018
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi SP 2010
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2018, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah penduduk 2018 dari Proyeksi SP 2010

Indikator	Definisi	Sumber Data
	kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)

- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots$$

(1)

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \dots\dots\dots$$

... (2)

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} :Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek

ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 182 Nagari/Desa di Kabupaten Pesisir Selatan, 2 Nagari/Desa masuk dalam prioritas 1 (1,09%) yaitu Nagari Gantiang Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera, 9 Nagari/desa prioritas 2 (4,9%) dan 21 Nagari/desa prioritas 3 (11,5%). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan IV Jurai, IV Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Koto XI Tarusan, Silaut Lunang, Basa Ampek Balai Tapan, Pancung Soal, Airpura dan Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir dan Lengayang yaitu sebanyak 91 Nagari/desa.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	0,000000490	27	14,8
2	0,000000630	27	14,8
3	0,000000147	37	20,3
4	0,000000187	37	20,3
5	0,000000199	27	14,8
6	0,000000254	27	14,8

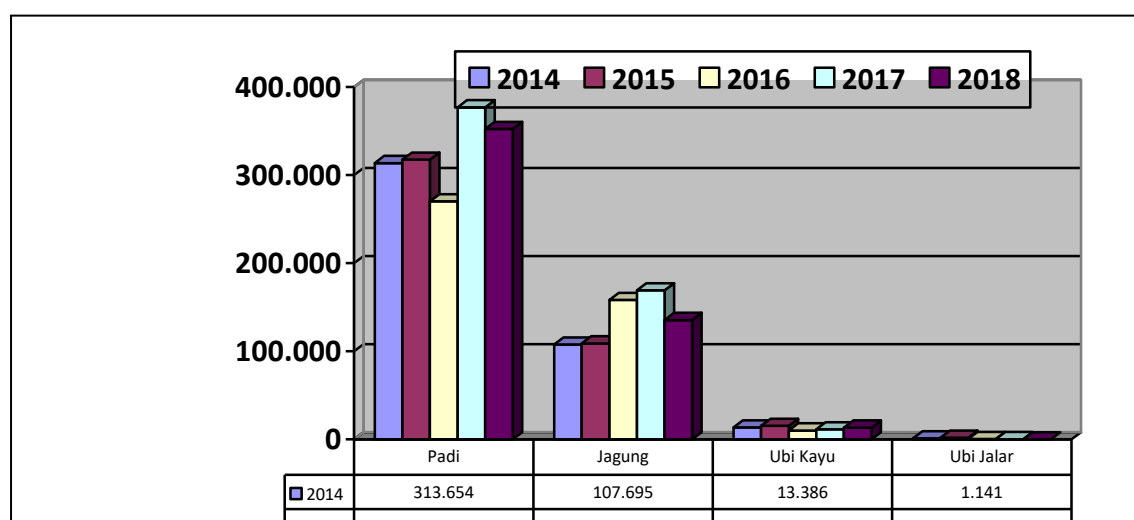
2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 39,48% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan yang menyumbang hampir dari total produksi sereal kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi meningkat selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 313.654 ton tahun 2014 menjadi 352.393 pada tahun 2018.

Tabel 2. Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2014-2018

SERELIA	PRODUKSI (TON)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Padi	313.654	317.373	270.221	376.971	352.393
Jagung	107.695	108.894	158.159	169.101	135.484
Ubi Kayu	13.386	15.263	9.892	11.204	13.169
Ubi Jalar	1.141	1.657	410	81	48
JUMLAH	435.876	443.187	438.682	557.357	501.094

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019



Tahun 2018, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 501.094 Ton, padi 352.393 Ton, Jagung 135.484 ton, Ubi Kayu 13.169 ton, dan Ubi Jalar 48 ton.

Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2014-2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,01 %, yaitu dari total produksi tahun 2014 sebesar 435.876 ton menjadi 501.094 ton pada tahun 2018. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 557.357 ton dan terkecil pada tahun 2014 sebesar 435.876 ton, Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan
Produksi (2014-2018)

No	Kecamatan	TOTAL SEREAL (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Koto XI Tarusan	27.448	24.295	19.542	25.935	17.815,3
2	Bayang	28.788	32.894	30.565	37.606	35.025,9
3	IV Nag Bayang Utara	10.755	7.121	7.687	11.198	10.614,0
4	IV Jurai	12.440	14.717	11.002	15.549	20.124,7
5	Batang Kapas	20.288	22.614	23.538	27.473	23.924,1
6	Sutera	42.148	31.660	32.338	42.698	41.493,6
7	Lengayang	34.426	43.493	32.867	47.215	50.327,0
8	Ranah Pesisir	35.801	45.677	37.534	57.536	43.644,6
9	Linggo Sari Baganti	35.050	45.176	48.097	56.921	50.040,6
1	Air Pura	33.890	48.307	52.862	68.151	35.651,2

0						
1						
1	Pancung Soal	57.740	41.676	52.007	50.319	41.394,7
1	Basa IV Balai					
2	Tapan	28.492	14.476	17.794	26.679	23.238,0
1	Ranah IV Hulu					
3	Tapan	16.832	14.354	20.632	29.794	24.769,2
1						
4	Lunang	32.656	33.907	37.725	43.423	47.969,5
1						
5	Silaut	4.893	5.910	4.192	5.575	2.412,2
	TOTAL	421.647	426.277	428.381	546.072	488.444,6

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019

Padi

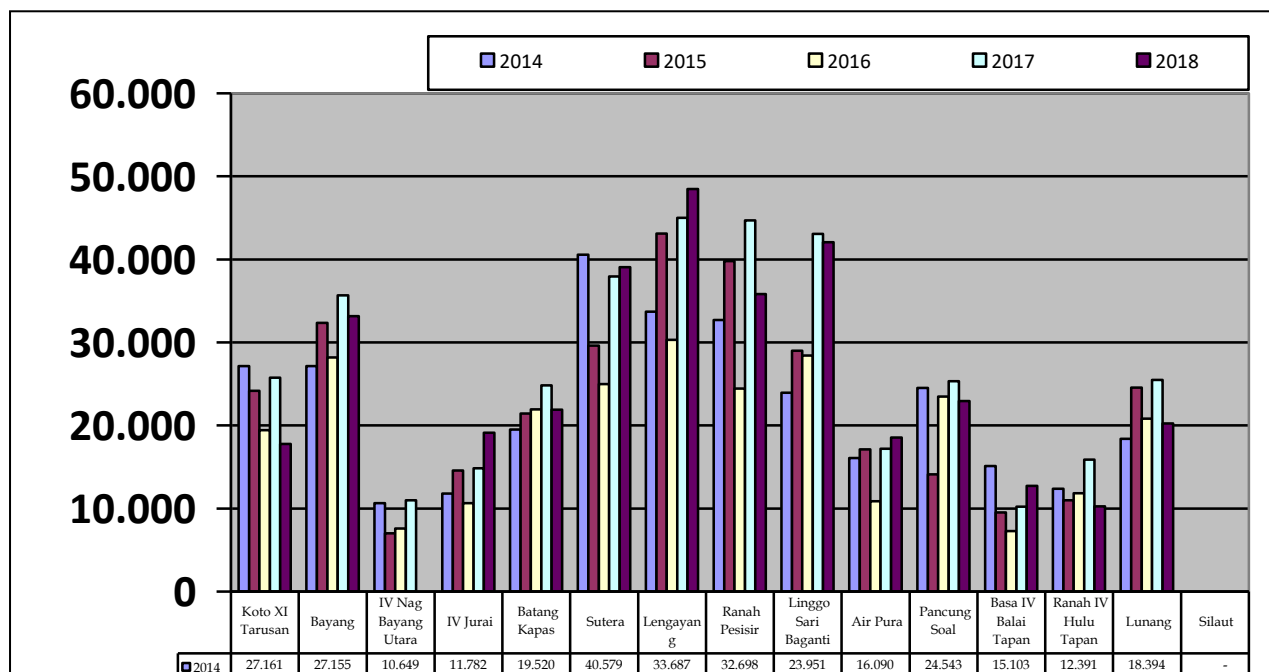
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir (2014-2018) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai tahun 2015, dan tahun 2016 mengalami penurunan, tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 376.971,20 Ton, tahun 2018 tuurn lagi menjadi 352.393,30 Ton, hal ini disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan ada penghitungan ulang Luas Lahan Sawah di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Program LP2B.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2015 - 2018

No	Kecamatan	PADI (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Koto XI Tarusan	27.161	24.167,00	19.448,50	25.772,50	17.780,80
2	Bayang	27.155	32.347,00	28.177,60	35.668,60	33.159,60
3	IV Nag Bayang Utara	10.649	7.008,00	7.584,10	11.005,90	10,260,90
4	IV Jurai	11.782	14.583,00	10.629,90	14.841,40	19.123,10
5	Batang Kapas	19.520	21.457,00		24.842,30	21.890,40

				21.932,30		
6	Sutera	40.579	29.598,00	24.983,30	37.937,90	39.061,50
7	Lengayang	33.687	43.101,00	30.321,80	45.002,70	48.461,80
8	Ranah Pesisir	32.698	39.809,00	24.464,40	44.709,30	35.836,30
9	Linggo Sari Baganti	23.951	28.979,00	28.429,00	43.070,60	42.077,80
10	Air Pura	16.090	17.114,00	10.855,60	17.184,00	18.549,90
11	Pancung Soal	24.543	14.126,00	23.464,90	25.329,40	22.961,10
12	Basa IV Balai Tapan	15.103	9.523,00	7.280,50	10.228,60	12.723,10
13	Ranah IV Hulu Tapan	12.391	10.999,00	11.829,90	15.892,90	10.274,30
14	Lunang	18.394	24.562,00	20.819,21	25.485,10	20.232,70
15	Silaut	-	-	-	-	-
	TOTAL	313.654	317.373,00	270.221,00	376.971,20	352.393,30

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019



Jagung

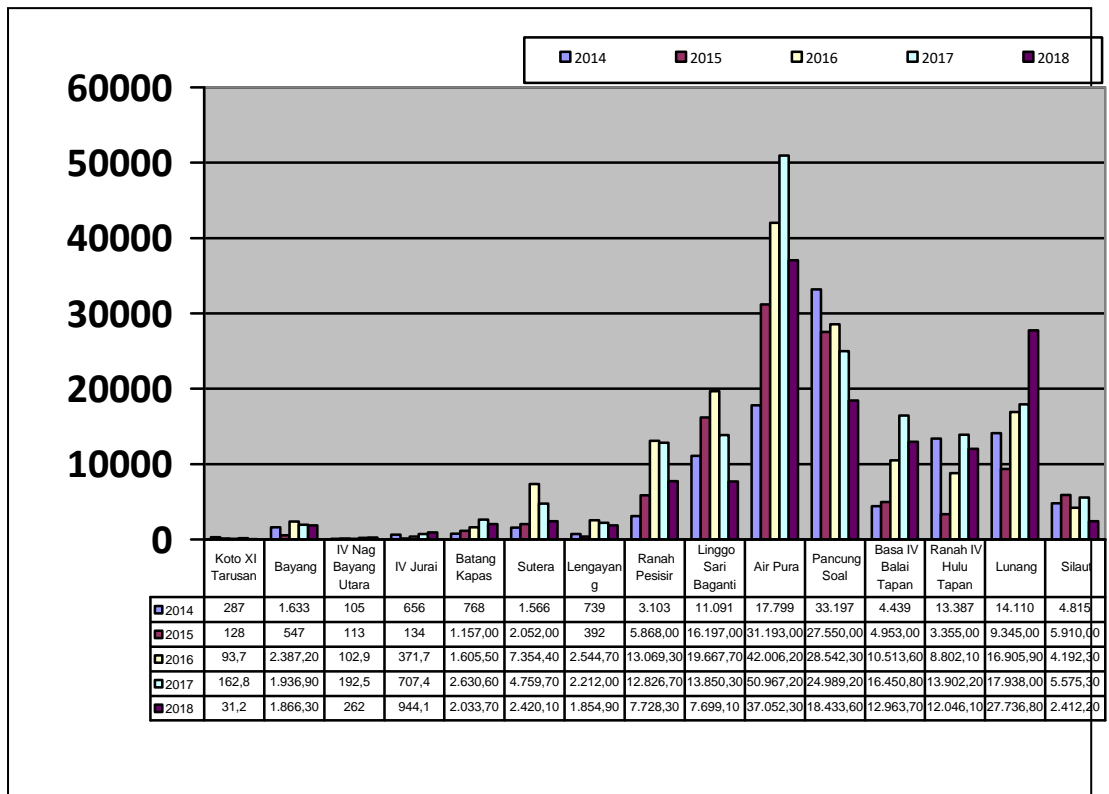
Pada tahun 2018, produksi jagung mencapai 135.484,40 ton. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 33.617,20 ton dengan produksi pada tahun 2017 sebesar 169.101,60 ton . Penurunan produksi pada tahun 2018 disebabkan peningkatan luas tambah tanam komoditi padi. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 37.052,30 ton ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Airpura sebesar 37.052,30 ton, menyusul Kecamatan Lunang sebesar 27.736,80 ton dan terendah Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 31,20 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2014 - 2018

No	KECAMATAN	JAGUNG (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Koto XI Tarusan	287	128,00	93,70	162,80	31,20
2	Bayang	1.633	547,00	2.387,20	1.936,90	1.866,30
3	IV Nag Bayang Utara	105	113,00	102,90	192,50	262,00

4	IV Jurai	656	134,00	371,70	707,40	944,10
5	Batang Kapas	768	1.157,00	1.605,50	2.630,60	2.033,70
6	Sutera	1.566	2.052,00	7.354,40	4.759,70	2.420,10
7	Lengayang	739	392,00	2.544,70	2.212,00	1.854,90
8	Ranah Pesisir	3.103	5.868,00	13.069,30	12.826,70	7.728,30
9	Linggo Sari Baganti	11.091	16.197,00	19.667,70	13.850,30	7.699,10
10	Air Pura	17.799	31.193,00	42.006,20	50.967,20	37.052,30
11	Pancung Soal	33.197	27.550,00	28.542,30	24.989,20	18.433,60
12	Basa IV Balai Tapan	4.439	4.953,00	10.513,60	16.450,80	12.963,70
13	Ranah IV Hulu Tapan	13.387	3.355,00	8.802,10	13.902,20	12.046,10
14	Lunang	14.110	9.345,00	16.905,90	17.938,00	27.736,80
15	Silaut	4.815	5.910,00	4.192,30	5.575,30	2.412,20
	TOTAL	107.695	108.894,00	158.159,50	169.101,60	135.484,40

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019, BPS



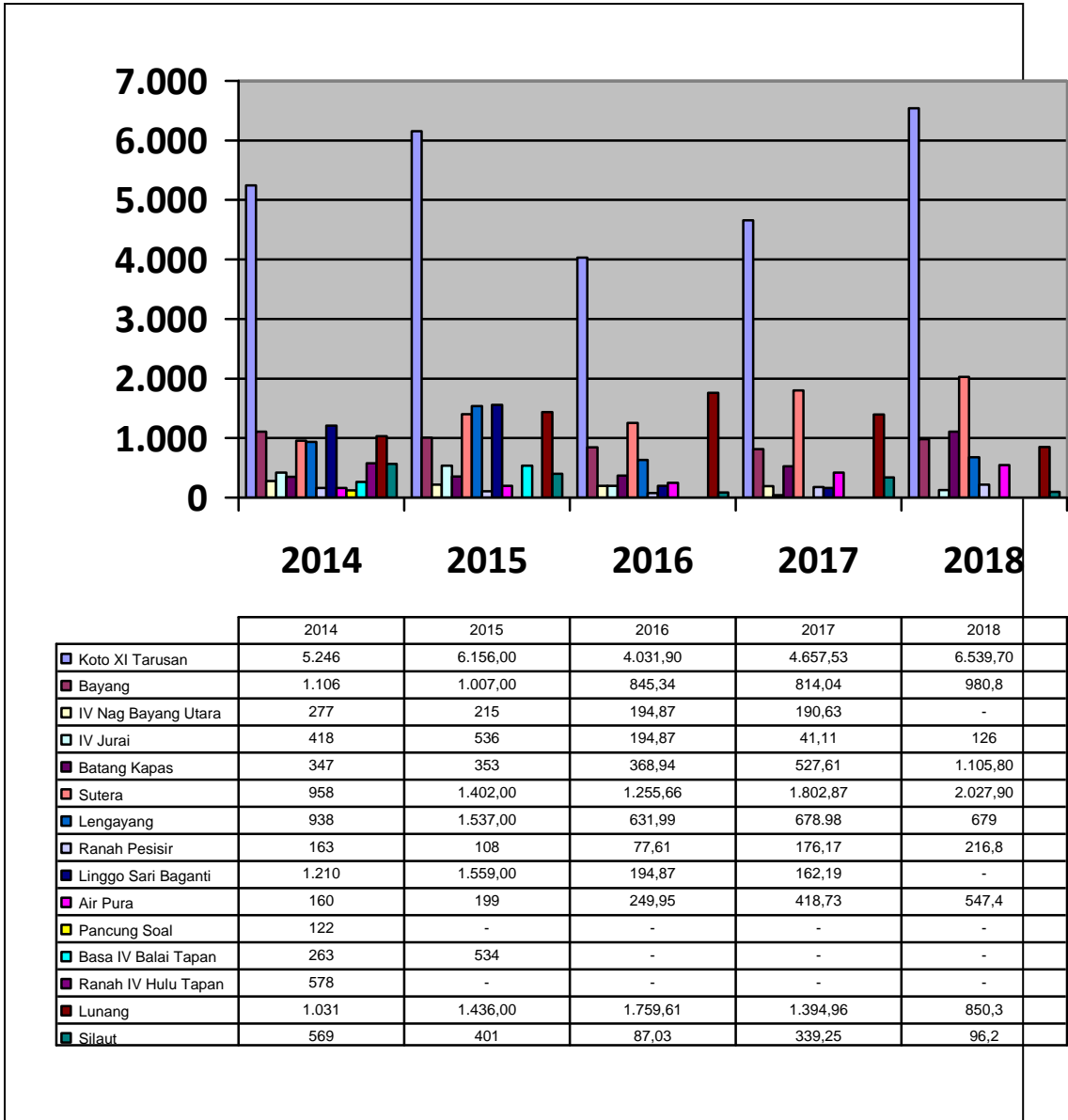
Ubi Kayu

Produksi ubi kayu meningkatmenurun dari 13.386,00 ton pada tahun 2014 menjadi 13.169,90 ton pada tahun 2018. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2014 meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan Rincian produksi ubi kayu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2014 - 2018 (Ton)

No	KECAMATAN	UBI KAYU				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Koto XI Tarusan	5.246	6.156,00	4.031,90	4.657,53	6.539,70
2	Bayang	1.106	1.007,00	845,34	814,04	980,80
3	IV Nag Bayang Utara	277	215,00	194,87	190,63	-
4	IV Jurai	418	536,00	194,87	41,11	126,00
5	Batang Kapas	347	353,00	368,94	527,61	1.105,80
6	Sutera	958	1.402,00	1.255,66	1.802,87	2.027,90
7	Lengayang	938	1.537,00	631,99	678,98	679,00
8	Ranah Pesisir	163	108,00	77,61	176,17	216,80
9	Linggo Sari Baganti	1.210	1.559,00	194,87	162,19	-
10	Air Pura	160	199,00	249,95	418,73	547,40
11	Pancung Soal	122	-	-	-	-
12	Basa IV Balai Tapan	263	534,00	-	-	-
13	Ranah IV Hulu Tapan	578	-	-	-	-
14	Lunang	1.031	1.436,00	1.759,61	1.394,96	850,30
15	Silaut	569	401,00	87,03	339,25	96,20
	TOTAL	13.386	15.263,00	9.892,64	11.204,06	13.169,90

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019.



Ubi Jalar

Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2014 - 2018) terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.657,00 ton. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 553,00 ton, Kecamatan Lunang sebesar

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

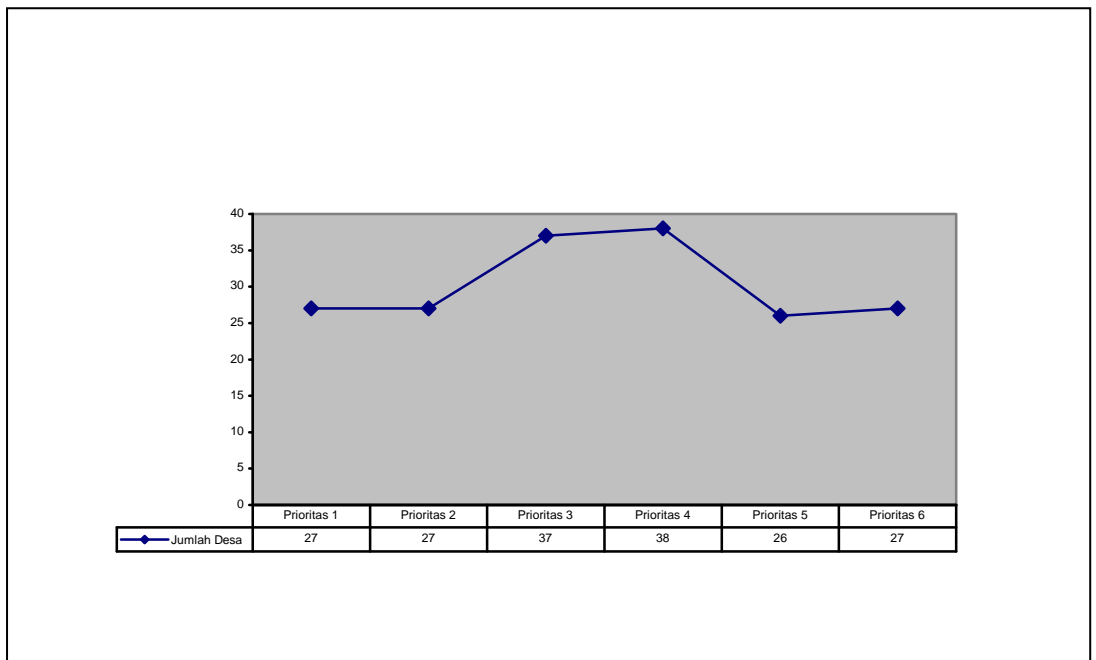
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 182 Nagari/Desa di Kabupaten Pesisir Selatan, 27 Nagari/Desa masuk dalam prioritas 1 (14,83,79%), 27 Nagari/Desa prioritas 2 (14,83%) dan 37 Nagari/Desa prioritas 3 (20,32%).

Tabel 2.8 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	0,0046	27	14,83
2	Prioritas 2	0,0047	27	14,83

3	Prioritas 3	0,0112	37	20,32
4	Prioritas 4	0,0124	38	20,87
5	Prioritas 5	0,0128	26	14,28
6	Prioritas 6	0,0138	27	14,83



2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2014-2018 mencapai 0,79% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi mengalami penurunan dengan angka mencapai -6,37% dan komoditi jagung mencapai -19,88%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 0,99 Ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,16 Sementara itu laju konversi lahan sebesar -4,75. Rasio sarana ekonomi

penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan pada periode 2017-2021 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
 - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
 - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
- (ii) Perluasan lahan sawah
 - a. Pengembangan lahan sawah
 - b. Optimalisasi penggunaan lahan
 - c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
 - d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat

- b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- c. Pemasaran produk pertanian, Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat missal TTI,
- d. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Pembelian gabah dan penjualan beras.
- e. Nagari Mandiri Pangan / Kawasan Mandiri Pangan.
- f. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat/ Lumbung Pangan Masyarakat.

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami penurunan dari 7,92% (35.860 jiwa) tahun 2016 menjadi 7,59% (34.920 jiwa) tahun 2018.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan
Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	Ket
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	35.020	38.130	25.860	35.530	34.920	
Persentase Penduduk Miskin	7,82	8,46	7,92	7,79	7,59	

Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2019, BPS

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2018, terdapat 28 Nagari/Desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (15,38%) (Prioritas 1). Sebanyak 27 Nagari/Desa (14,83%) masuk prioritas 2, dan 36 Nagari/Desa (19,78%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 28 Nagari/Desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas.

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	0,00000	28	15,38
2	0,00149	27	14,83
3	0,00399	36	19,78
4	0,00616	38	20,87
5	0,00799	21	11,53
6	0,01144	26	14,28

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas

pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2018, BPS, di Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Desa yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, pasang, dll) untuk prioritas 1 tidak terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dengan arti kata semua jalan di Nagari/Desa sudah bisa dilalui oleh Kendaraan Roda 4 dan 2, Untuk Prioritas 2 terdapat di Kecamatan Silaut (Nagari/Desa Talang Binjai) dan Prioritas 3 terdapat di Kecamatan Silaut Nagari/Desa Durian Seribu, Kecamatan Lunang di Nagari/Desa Lunang Tiga, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan terdapat di Nagari/Desa Kubu Tapan, Kecamatan Airpura terdapat di Nagari/Desa Inderapura Utara, dan Kecamatan Koto XI Tarusan terdapat di Nagari/Desa Mandeh dan Sungai Nyalo Mudiak Aie.

Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Pesisir Selatan akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi laut masih menjadi bagian dari moda

transportasinya. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan Nagari/Desa Mandeh, Sungai Nyalo. Data yang akurat untuk moda transportasi laut tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2021 diantaranya :

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990

serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akse air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,2591$	28	15,38
2	$0,1829 < 0,2591$	27	14,83
3	$0,0807 < 0,1829$	36	19,78
4	$0,0271 < 0,0807$	38	20,87
5	$0,0085 < 0,0271$	27	14,83
6	$< 0,0085$	26	14,28

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 3.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	≥ 16	26	14,28

2	6-<16	27	14,83
3	2-<6	36	19,78
4	1-<2	38	20,87
5	0-<1	27	14,83
6	<0	26	14,28

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan ;
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014-2018 sebanyak 45 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan pada tahun 2018 di Kecamatan Koto XI Tarusan (7 balita) dan Kecamatan Bayang, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggo Sari Baganti masing-masing 3 balita, dan terendah/

tidak ditemukan berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Sutera, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut (0 balita), Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan BAB. Tapan terdapat masing-masing 1 balita, serta Kecamatan pancng Soal terdapat 3 balita.

Tabel 4.2 Penderita Gizi Buruk 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDERITA GIZI BURUK
1	Koto XI Tarusan	7
2	Bayang	3
3	IV Nagari Bayang Utara	-
4	IV Jurai	1
5	Batang Kapas	3
6	Sutera	-
7	Lengayang	3
8	Ranah Pesisir	-
9	Linggo Sari Baganti	3
10	Air Pura	1
11	Pancung Soal	2
12	Basa IV Balai Tapan	1
13	Ranah IV Hulu Tapan	1
14	Lunang	--
15	Silaut	--
TOTAL		25

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019 (BPS)

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah 66 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten

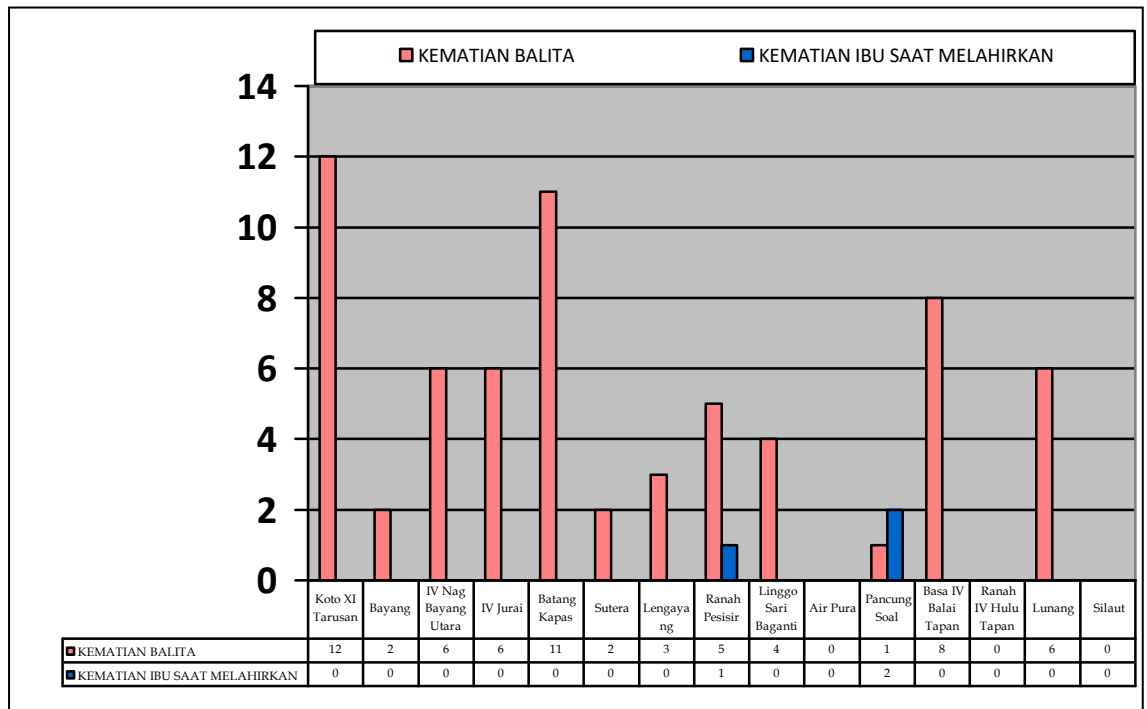
Pesisir Selatan sebanyak 3 jiwa. Angka kematian balita tertinggi terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan (12 jiwa) dan terendah / Tidak ada kematian balita di Kecamatan Airpura, Kecamatan Ranah Ampek hulu Tapan dan Kecamatan Silaut. Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Pancung Soal (2 jiwa) dan terendah di Kecamatan Ranah Pesisir (1 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

NO	KECAMATAN	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Koto XI Tarusan	12	-	12
2	Bayang	2	-	2
3	IV Nagari Bayang Utara	6	-	6
4	IV Jurai	6	-	6
5	Batang Kapas	11	-	11
6	Sutera	2	-	2
7	Lengayang	3	-	3
8	Ranah Pesisir	5	1	6
9	Linggo Sari Baganti	4	-	4
10	Air Pura	-	-	-
11	Pancung Soal	1	2	3
12	Basa IV Balai Tapan	8	-	8
13	Ranah IV Hulu Tapan	-	-	-
14	Lunang	6	-	6
15	Silaut	-	-	-
TOTAL		66	3	69

Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka 2019 (BPS)

Gambar 4.3 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan.

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari

nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit

dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
 - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan).
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.
- Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi

pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam BAB I, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 (Enam) Indikator yang berhubungan dengan Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan Penghidupan, serta Pemanfaatan Pangan dan Gizi, yang dijelaskan secara rinci pada BAB II, III dan IV. Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi Kerawanan Pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan Prioritas yang **RELATIF LEBIH TAHAN PANGAN**. Dengan kata lain, wilayah (desa) **PRIORITAS 1 MEMILIKI TINGKAT RESIKO KERENTANAN** terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 182 Nagari/Desa yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan maka didapatkan 2

(dua) Nagari Prioritas 1, 9 Nagari Prioritas 2, 21 Nagari Prioritas 3, 72 Nagari Prioritas 4, 57 Nagari Prioritas 5 dan 21 Nagari Prioritas 6.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	2	1,09
2	9	4,94
3	21	11,53
4	72	39,56
5	57	31,31
6	21	11,53

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 terdapat di wilayah Kecamatan Sutera (Nagari Gantiang Mudiek Utara Surantih) dan Kecamatan Koto XI Tarusan (Nagari Mandeh).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Silaut (Nagari Talang Binjai), Kecamatan Airpura (Nagari Inderapura Utara), Kecamatan Linggo Sari Baganti (Nagari Rantau Simalenang Air Haji), Kecamatan Ranah Pesisir (Nagari Sungai Tunu Utara), Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Nagari Koto Ranah dan Nagari Muaro Aie) dan Kecamatan Koto XI Tarusan (Nagari Sungai Pinang, nagari Taratak Sungai Lundang, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Air).

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Silaut (Nagari Ait Hitam), Kecamatan Lunang (Nagari Lunang Tiga), Kecamatan BAB. Tapan (Nagari Bukit Buai Tapan), Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Nagari Kubu Tapan, Simpang Gung Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Balirik Tapan), Kecamatan Pancung Soal

(Nagari Inderapura Selatan, Tigo Sungai Inderapura), Kecamatan Airpura (Nagari Palokan Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Muara Inderapura), Kecamatan Linggo Sari Baganti (Nagari Punggasan Tmur), Kecamatan Ranah Pesisir (Nagari Sungai Liku Pelangai), Kecamatan Sutera (Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih), Kecamatan Batang Kapas (Nagari Taratak Tompatih IV Koto Mudiek), Kecamatan IV Jurai (Nagari Limau Gadang Lumpo), Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Nagari Pancuang Taba, Limau Gadang Pancuang Taba), Kecamatan Koto XI Tarusan (Nagari Setara Naggalo, Duku Utara).

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh :

- (1) Luas Lahan Sawah tidak sebanding dengan jumlah penduduk, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya harus mengimport bahan pangan dari luar Nagari setempat.
- (2) Akses jalan yang belum memadai untuk dilalui oleh Kendaraan Roda 4 (empat).
- (3) Tingkat Kesejahteraan penduduk yang masih rendah, apakah itu tingkat pendidikan dan SDM masyarakatnya, sehingga daya beli masyarakat tidak memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (4) Sumber air bersih yang belum tersedia, apakah itu saluran PDAM maupun saluran air lainnya.
- (5) Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Nagari tersebut.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh:

- (1) Luas Baku lahan sawah tidak sebanding dengan luas lahan Nagari dan jumlah penduduknya, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan sawah dengan baik, dan produksi padi mengalami penurunan, yang mengakibatkan konsumsi masyarakat sangat kurang.
- (2) Tenaga Kesehatan yang sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Nagari tersebut.
- (3) Sumber air bersih yang masih kurang sehingga Rumah tangga tidak bisa mengakses air bersih ditingkat rumah tangganya, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya tidak memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat diminum, sumber air bersih yang tidak terlindungi dan akan meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makan yang pada akhirnya akan memperngaruhi status gizi masyarakat.
- (4) Tingkat Kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga daya beli masyarakat tidak memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh :

- (5) Jumlah Tenaga Kesehatan yang sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah kepadatan penduduk di Nagari tersebut, tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angkat kesakitan penduduk dan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat di nagari akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan

aman, jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

- (6) Sumber air bersih yang masih kurang sehingga Rumah tangga tidak bisa mengakses air bersih ditingkat rumah tangganya, air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya tidak memenuhi syarat kesehatan dan belum dapat diminum/perlu proses yang panjang sehingga dapat di minum, sumber air bersih yang tidak terlindungi dan akan meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makan yang pada akhirnya akan memperngaruhi status gizi masyarakat.
- (7) Tingkat Kesejahteraan penduduk yang masih rendah, sehingga daya beli masyarakat tidak memadai untuk mengakses pangan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada :

- a. Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Sutera, Koto XI Tarusan, Silaut, Airpura, Linggo Sari Baganti, Ranah Pesisir, IV Nagari Bayang Utara, BAB. Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal.
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desanya di Kepulauan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- d. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.
- e. Tingkat jumlah tenaga kesehatan yang harus sesuai dengan jumlah kepadatan penduduk.
- f. Akses air bersih di tingkat Rumah Tangga yang masih belum tertangani dengan baik.
- g. Tingkat kesejahteraan penduduk dalam mengakses kebutuhan pangan untuk memenuhi pangan rumah tangganya.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal, berupa program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru/ cetak sawah baru.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan usaha tani, air bersih, embung), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
- f. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat/ Lumbung Pangan Masyarakat sebagai salah satu usaha Tingkat Ketersediaan pangan yang memadai.
- g. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di tingkat Nagari.
- h. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Nagari bersama Gapoktan.
- i. Desa Mandiri Pangan/ Nagari Mandiri Pangan dengan melibatkan perangkat Nagari dan OPD yang ada di Kabupaten dan Provinsi.